

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual	17
F. Landasan Teoritis	20
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II DASAR-DASAR TEORITIK PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DELEGASI	37
A. Norma Hukum Dalam Negara	37
1. Pengertian dan Jenis Norma Hukum	37
2. Hierarki Norma Hukum Dalam Negara	39
B. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	41
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Menurut Doktrin	41
2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Hukum Positif	52
C. Pendelegasian Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	56
1. Atribusi dan Delegasi Kewenangan	56

	2. Prinsip-Prinsip Delegasi Regulasi	61
BAB III	PENGATURAN PENDELEGASIAN PEMBENTUKAN PERKADA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG- UNDANGAN	67
A.	Pengaturan Kedudukan Perda dan Perkada Dalam Amandemen UUD 1945	67
	1. Kedudukan Perda Sebagai Peraturan Atribusi dan Peraturan Delegasi	67
	2. Kedudukan Perda Dalam Hubungannya Dengan Peraturan Menteri	74
	3. Kedudukan Perkada Dalam Amandemen UUD 1945	77
B.	Pengaturan Pembentukan Perkada Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah	83
	1. Penamaan Perkada	83
	2. Jenis dan Fungsi Perkada	84
	3. Pengaturan Pendelegasian Kepada Perkada Dalam Masa Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999	86
C.	Pengaturan Pendelegasian Pembentukan Perkada Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	87
	1. Penamaan Peraturan Kepala Daerah	87
	2. Jenis dan Fungsi Perkada	88
	3. Pengaturan Pendelegasian Kepada Perkada Dalam Masa Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004	89
D.	Pengaturan Pendelegasian Pembentukan Perkada Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	95
	1. Jenis dan Fungsi Perkada	95
	2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Pembentukan Perkada Antara UU Nomor 23 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 ...	113
	3. Pengaturan Pendelegasian Kepada Perkada Dalam Masa Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014	115

BAB IV	IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DELEGASI DAN SINKRONISASI MATERI MUATAN DENGAN PERATURAN DAERAH YANG MENDELEGASIKAN	121
A.	Eksistensi Perkada Delegasi Dalam Perda	121
B.	Perumusan Kalimat Delegasi Dalam Perda	126
1.	Ragam Perumusan Kalimat Delegasi Dalam Perda	126
2.	Frase “Diatur Dengan” dan “Diatur Lebih Lanjut Dengan”	128
3.	Frase “Diatur Dalam”	132
4.	Pendelegasian Blanko	134
C.	Impelementasi Pembentukan Perkada Delegasi Atas Perintah Peraturan Daerah	136
1.	Implementasi Pelaksanaan Pembentukan Perkada Delegasi Atas Perda Tahun 2018- 2019	136
2.	Analisis Implementasi Pelaksanaan Pembentukan Perkada Delegasi Atas Perintah Perda Tahun 2018- 2019	145
D.	Sinkronisasi Materi Muatan Perkada Delegasi Dengan Perda	155
1	Delegasi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah	155
2.	Pergub Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah	159
BAB V	PENUTUP	163
A.	Kesimpulan	163
B.	Saran	168
DAFTAR PUSTAKA		169

